

PARADOKS DAN SINJUTAS (SINERGI-KEBERLANJUTAN-KETUNTASAN) GERAKAN FILANTROPI DI INDONESIA

OLEH :
ZAENAL ABIDIN¹

¹ Kepala Lab.Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Pembangunan masyarakat berbasis kekuatan potensi lokal menjadi isu strategis beberapa tahun belakangan ini. Potensi lokal dinyatakan dalam aktifitas keswadayaan masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Wujud keswadayaan tersebut berupa partisipasi pembangunan jembatan, jalan kampung, gedung pertemuan, bahkan sampai dengan kepedulian sosial terhadap sesama. Realitas tersebut menjadi bagian dari kohesi sosial yang tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pemerintah, namun kelak menjadi bagian dari penguatan-penguatan peran *civil society* di Indonesia. *Civil Society* dapat diartikan sebagai kenyataan dari kehidupan sosial yang terorganisasi yang bersifat sukarela, swadaya, swasembada dan terbebas dari tekanan negara¹⁸. Potret gerakan *civil society* ini di Indonesia berkembang pesat dengan salah satunya dengan munculnya aktifitas dan lembaga filantropi baik dengan aroma agama maupun tidak. Praktik-praktik filantropi baik secara individu, kelompok maupun *corporate* semakin menggeliat sehingga menjadi pantas bagi kita untuk tidak sekedar percaya, ataupun pasrah dengan kegiatan-kegiatan filantropi tanpa perlu bersikap kritis dengan hal tersebut.

PENDAHULUAN

Patut disadari bahwa gerakan filantropi sebagai narasi dari kehidupan sosial yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan secara alamiah. Bahkan filantropi merupakan fitrah manusia dalam menjalani kehidupan ini salah satunya berbagi kasih dengan manusia lain. Berbagi kasih ini dapat diwujudkan dalam bentuk sikap-sikap peduli terhadap sesama, simpati terhadap keprihatinan orang lain bahkan banyak diantara mereka, larut dalam empati kehidupan orang lain yang kondisi

hidupnya tidak beruntung. Konsep berbagi kasih ini sering populer dengan sikap berderma atau *charity*.

Kata atau istilah filantropi tergolong kata serapan dan belum begitu populer di Indonesia. Istilah ini sampai sekarang belum mendapatkan perpadanan kata yang pas dan disepakati sebagai kata baku. Sebagian masyarakat mengartikannya sebagai “kedermawanan”, “cinta kasih”, “kasih sayang”, “kesetiakawanan”, dan sebagainya yang merupakan terjemahan bebas dari

¹⁸ Abidin, Zaenal dkk. Penguatan Lembaga Zakat dan Masjid sebagai Pemberdayaan *Civil Society* dalam Demokrasi, *Civil Society & Globalisasi*.hal-23.2011.

philanthropy. Kata *philanthropy* sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phillen* yang berarti mencintai (to love) dan *anthropos* yang berarti manusia (human kind), sehingga kata *philanthropy* dimaknai sebagai “ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia”. Kamus Webster tidak member batasan pengungkapan cinta kasih ini dalam bentuk uang atau barang, melainkan “pekerjaan atau upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta pada sesama dan kemanusiaan”.

Azyumardi Azra (2012) dalam salah satu tulisannya tentang komparatif filantropi menjelaskan survei Global@dvisor berjudul “*View on Globaliasation and Faith*” yang dilakukan oleh Ipsos MORI di 24 negara pada April 2011¹⁹. Survei dengan jumlah 20.000 responden dengan sebaran sebagai berikut Berdasarkan Garis Keagamaan : Kristiani (Katolik dan Protestan di 19 negara), Islam (Indonesia, Arab Saudi, Turki), Hindu (India) dan Budha (Cina, Jepang dan Korea Selatan). Survei tersebut menegaskan bahwa agama sebagai motivator setiap orang dalam melakukan pemberian (*giving*) dan berbagi (*sharing*), baik dalam bentuk waktu, tenaga dan uang (materiil). Dorongan agama menjadi penentu dari 24 persen umat Kristiani, Muslim sebanyak 61 persen, Buddhis 20 persen dan Hindu 33 persen. Bahkan dari 61 persen muslim yang berderma, Muslim Indonesia

mencapai 91 persen dengan 83 persennya di bawah usia 35 tahun, Muslim Arab Saudi 71 persen dan Muslim Turki 33 persen.

Survei di atas kemudian menjadi salah satu pijakan kita untuk melihat secara dekat bahwa ada potensi filantropi yang sangat besar untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka yang fakir, miskin, tidak berdaya dalam mengakses layanan publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia di sekitar Daerah Aliran Sungai, Komunitas Adat Terpencil, kaum miskin perkotaan, dan sebagainya. Akan tetapi kondisi tersebut masih jauh dari gemerlapnya potensi filantropi yang ada dengan banyaknya keberhasilan program-program filantropi.

Secercah Potensi Dana Filantropi di Indonesia

Kategorisasi potensi filantropi di Indonesia dapat dibagi antara lain agama, perusahaan, masyarakat sipil. Dalam kategori agama misalnya, Umat Islam Indonesia sampai dengan tahun 2014, Ahmad Syafi’i Maarif mengutip pernyataan Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, bahwa masjid dan musholla di Indonesia berjumlah 850 ribu masjid dan musholla²⁰. Kemudian umat Kristiani sebagaimana penjelasan Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat dalam Rapat Kerja Kementerian Luar Negeri dengan

¹⁹ Azra, Azyumardi.2012.Filantropi.untuk.Kohesi.Sosial<http://nasional.kompas.com/read/2012/08/18/1654224/>

²⁰ Maarif, Ahmad Syafii.2014.Masjid dan Kampanye Politik.Tuesday, 04 February 2014, 06:00 WIB.republika.online.

Perwakilan RI di Luar Negeri yang diadakan di Kemlu, Pejambon, Jakarta, Rabu (22/2/2012) menjelaskan bahwa jumlah gereja saat ini 135.000²¹. Sedangkan jumlah vihara 2.354, jumlah pura 24.837 dan berjumlah kelenteng 552²².

Melihat jumlah rumah ibadah di atas maka setidaknya kita dapat mengkalkulasi rata-rata dana yang diperoleh rumah ibadah selama 1 bulan. Asumsi terendah dan progresif yang digunakan adalah perolehan dana rumah ibadah sebagaimana berikut, menggunakan asumsi perolehan terendah dari data mini riset di Malang Raya tahun 2012:

1. Masjid dan Musholla, berdasarkan pengamatan penulis rata-rata masjid dan musholla setiap hari Jum'at perolehan infaq Rp. 500.000 s.d. Rp. 2.000.000,-. Maka dalam 1 bulan, potensi dana infaq seluruh masjid dan musholla di Indonesia minimal sebesar 1,7 triliun rupiah per bulan dan potensi progresif bisa mencapai pada angka 6,8 triliun rupiah/bulan. Perolehan dana ini belum ditambah dengan perolehan sejumlah kegiatan hari besar Islam, penggalan dana insidental dan momentum bulan Ramadhan yang dapat menembus lebih dari 4 kali lipat

perolehan infaq selain bulan Ramadhan. Artinya dalam 1 tahun masjid dan musholla di Indonesia mampu menembus angka 81 triliun rupiah.

2. Bagaimana dengan potensi dana colecte atau perpuluhan di gereja-gereja? Mengambil hasil laporan mini riset mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 2012 di kota Malang, setiap gereja baik Pantekosta, Jawi Wetan, Parokial mampu mengumpulkan dana rata-rata minimal 2,5 juta rupiah s.d. 10 juta rupiah per minggu. Artinya potensi terendah umat Kristiani mampu mendonasikan dananya dalam 1 bulan sebesar 1,350 triliun rupiah, dengan potensi progresif sebesar 5,4 triliun rupiah. Hal ini belum didukung dengan kegiatan besar umat Kristiani, sehingga diperkirakan potensi umat dana sosial umat Kristiani dalam 1 tahun mampu mencapai angka 65 triliun rupiah.
3. Terkait dengan dana sosial umat Hindhu, Buddhis dan Kong Hu Cu, tidak banyak ditemukan data yang mendekati pasti namun sikap filantropi di kalangan umat-umat tersebut

²¹ Halim, Abdul.2012.www.nahimunkar.com/sikap-tegas-jusuf-kalla-soal-gereja-di-depan-700-pendeta. Kamis, 23 Februari 2012.

²² Nur.2013.Inilah Fakta Pertumbuhan Rumah Ibadah di Indonesia.Rubrik politik.
<http://wartaekonomi.co.id/berita10828/inilah-fakta->

pertumbuhan-rumah-ibadah-di-indonesia.html.22 Mei 2013

cenderung progresif, jika diasumsikan bahwa perolehan dana mereka rata-rata 3 juta rupiah per bulan maka dalam 1 bulan potensi dananya mampu mencapai angka 83 milyar rupiah. Sehingga dalam 1 tahun mampu mencapai angka 1,5 triliun rupiah.

Berdasarkan potensi dana umat Islam, Kristiani, Hindu, Buddhis dan Kong Hu Cu, maka dalam aspek dorongan motivasi di Indonesia saja potensi dananya mampu mencapai angka 147,5 triliun rupiah per tahun. Nilai tersebut bisa dilihat sebagai angka yang progresif dari semua umat beragama saat ini.

No	Jenis Lembaga	Keterangan
1.	Badan Amil Zakat (BAZ)	Lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah berpusat di Jakarta dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kemudian memiliki jaringan ditingkat kota dan kabupaten hampir di seluruh Indonesia dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Serta di setiap kementerian dengan nama Unit Pengelola Zakat (UPZ).
2.	Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Lembaga zakat yang dibentuk oleh kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan. Lembaga ini tumbuh pesat dan sporadis di setiap kota di Indonesia, dengan fasilitas dan pelayanan yang baik dan sistemik.
3.	Panitia Zakat, Infaq dan Shodaqoh (PANZIS)	Lembaga temporer ini berdiri di setiap masjid dan mushollah pada saat bulan Ramadhan ataupun even-even peringatan hari besar Islam. Jumlahnya mencapai ribuan di Indonesia. Bahkan lembaga temporer ini juga dibentuk di sekolah-sekolah pada saat bulan Ramadhan.
4.	Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	Lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran ganda, yakni menjalankan fungsi perbankan dan baitul maal. Sehingga zakat bagi hasil dari keuntungan usaha perbankan lembaga ini akan di kelola oleh baitul maal yang menjalankan nilai-nilai filantropis. Jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun karena lembaga semacam ini relatif mudah berdiri semacam koperasi.
5.	Koperasi Syari'ah (Kopsya), Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), dan Bank Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah	Lembaga ini tidak jauh beda dengan model BMT, yang membedakan hanyalah pada sisi legalitas badan hukumnya saja. Trend perbankan syari'ah menjadi primadona dalam dunia perbankan karena mereka tidak banyak terpengaruh oleh kondisi eksternal. Jumlahnya juga terus tumbuh seiring dengan minat masyarakat dan margin keuntungan yang relatif aman.

Potensi lain dana filantropi di Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah dana zakat, infaq dan shodaqoh serta wakaf. Ketua BAZNAS Indonesia Didin Hafiduddin menyatakan potensi dana zakat kita saat ini mencapai 217 triliun rupiah, hal ini

sebagaimana hasil penelitian IPB bekerjasama dengan BAZNAS Indonesia. Akan tetapi realisasi perolehan zakat kita hanya 1,5 triliun rupiah pada tahun 2010 dan diperkirakan pada

SHARE: SOCIAL WORK JURNAL	VOLUME: 6	NOMOR: 2	HALAMAN: 154 - 272	ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e)
---------------------------	-----------	----------	--------------------	--

tahun 2013 hanya mampu mencapai angka 2 triliun rupiah saja ²³.

Zaenal (2012) menjelaskan bahwa dalam aspek filantropi Islam saja ada beberapa potensi yang terus berkembang sebagaimana berikut ²⁴:

Potensi berikutnya adalah dari aktifitas filantropi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana ketentuan dalam UU No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan berkontribusi pada pembangunan sosial, minimal 2,5 % dari laba perusahaan. Hasil penelitian PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) dan Dompot Dhuafa mencatat jumlah sumbangan yang disalurkan perusahaan mencapai Rp 8,6 trilyun atau sekitar 718 milyar per bulan. Sumbangan tersebut disalurkan oleh 455 perusahaan untuk mendukung 1.856 program sosial. Penelitian “*Trend Corporate Philanthropy di Indonesia*” ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kegiatan filantropi perusahaan yang dipublikasi di 14 media cetak dan 14 media online selama tahun 2013 ²⁵.

Menariknya, dalam satu dekade akhir ini ternyata peran media elektronik dan media massa dalam meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap isu-isu sosial sangat efektif. Terbukti, minta media massa dalam penggalangan dana sosial semakin marak bahkan tak jarang menampilkan kesan superlatif informasi kepada masyarakat. Penelitian Muhamad Heychael dkk (2013) ²⁶, menjelaskan bahwa pada saat Tsunami Aceh 2004, Metro TV Melalui program “Indonesia Menangis” menggalang dana hingga 40 miliar rupiah, Public Interest Research and Advocay Center (PIRAC) dalam laporan investigasinya pada 2006 (laporan sampai dengan 10 Agustus 2005) mencatat selama Tsunami Aceh, media massa (elektronik dan cetak) berhasil menggalang dana lebih dari Rp 367 milyar. Jauh lebih besar dari dana pengumpulan perusahaan sebesar 21,6 milyar rupiah dan LSM 77, 05 milyar rupiah. Belum lagi bermunculan program-program donasi di setiap stasiun televisi seperti Indosiar dengan program “Peduli Kasih”. Di ikuti dengan program “Satu Untuk Negeri” milik TV One, “Yayasan ANTV Peduli Untuk Negeri” milik ANTV, “Beasiswa Obsesi” milik Global TV, dan MNC Group dengan istilah “peduli”:

²³

<http://birokrasi.kompasiana.com/2013/08/01/ternyata-indonesia-memiliki-potensi-zakat-terbesar-di-dunia-581023.html>

²⁴ Abidin, Zaenal.2012. Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat (suatu studi pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Malang).Tesis.hal 6.

²⁵ Eka Putra, Maifil.2014.Sumbangan Perusahaan Mencapai 8,6 Triliun.news.pirac.org.19 Juni2014.

²⁶ Heychael, Muhamad dan Roy Thaniago.2013. Ketika Televisi Peduli:Potret Dilematis Filantropi Media (Laporan Penelitian Remotivi atas Praktik Penggalangan Dana Publik di 10 Stasiun Televisi). Remotivi dan Yayasan TIFA). lisensi Creative Common Attribution 3.0.

RCTI Peduli, MNC TV Peduli, Global TV Peduli, dan bahkan juga Trans 7 Peduli. Jumlah donasi yang dikumpulkan oleh media massa baik televisi, koran, radio, sosial media, jumlahnya milyaran rupiah dan terus akan bertambah seiring dengan eksistensi media. Filantropi media menjadi kajian baru dalam perkembangan gerakan filantropi saat ini, dan harusnya sangat diperhitungkan dalam perkembangan masa depan filantropi Indonesia.

Potensi dana filantropi yang ketiga adalah dari masyarakat sipil. Konsep masyarakat sipil sering diidentikkan dengan kata *civil society*. Jelmaan masyarakat sipil kemudian terlembaga dalam bentuk NGO dan LSM . Bahkan membanjirnya dana-dana sosial dari negara asing atau internasional yang mengalir ke hampir semua LSM yang ada di Indonesia, mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan potensi dan pasar untuk memberikan pengaruh kuat dalam setiap kebijakan internasional lembaga-lembaga donor. Seperti kita ketahui, lembaga donor internasional *Asia Foundation*, *Ford Foundation*, *TIFA Foundation* dan sebagainya semuanya berkepentingan pula untuk turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Banyaknya lembaga donor yang berkepentingan di Indonesia, maka tidak heran apabila puluhan lembaga donor baik dalam

maupun luar negeri turut ambil bagian dalam isu-isu sosial dan ekonomi dengan konsep filantropi modern. Beberapa kegiatan lembaga donor selama ini antara lain ²⁷:

1. Infrastruktur dan teknologi, yaitu pembangunan fisik serta penyediaan, pembuatan dan penelitian mengenai teknologi pendukung. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya bisa ikut membantu pembiayaan dalam penyediaan dana instalasi fasilitas umum misalnya pembangkit listrik, instalasi air minum untuk masyarakat, penyediaan teknologi tepat guna pendukung usaha produktif, dan lainnya.
2. Lingkungan hidup, yaitu berbagai upaya untuk menjaga kelestarian alam, serta memberikan penyadaran serta pendidikan kepada masyarakat mengenai manajemen sumber daya alam. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan misalnya tentang penjagaan daerah tangkapan air, penyadaran masyarakat untuk beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan, dan lain-lainnya.
3. Ekonomi, yaitu segala kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan modal, menciptakan mata pencarian dan meningkatkan pendapatan masyarakat,

²⁷ MACHFUDH.2010. MENGAKSES DANA HIBAH DAN PEMBIAYAAN LAIN DARI LEMBAGA DONOR POTENSIAL DI INDONESIA

termasuk juga penyediaan layanan finansial. Sumber pembiayaan di bidang ini dapat membantu program-program yang terkait untuk penyediaan modal, penyiapan dan pengelolaan usaha produktif; pembukaan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan; dan lainnya.

4. Sosial, yaitu segala hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat, gejala dan perilakunya. Contohnya adalah pembangunan instalasi listrik di daerah-daerah tertinggal dalam rangka pengentasan kemiskinan, pendampingan masyarakat dalam menyerap teknologi tepat guna, fasilitasi pembentukan organisasi pengelola listrik di masyarakat, pembentukan dan penguatan jaringan masyarakat dan pengusaha, dan lainnya.
5. Pemerintahan dan kebijakan, yaitu berbagai upaya advokasi dan penyusunan peraturan serta anggaran negara (tingkat pusat dan lokal) yang dapat mewakili kebutuhan pengembangan sector tertentu misalnya sector energi yang ramah lingkungan. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk membantu penyediaan kebijakan yang mendukung di suatu daerah, pengalokasian dana pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan oleh pemerintah, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan studi kelayakan, dan lainnya.

6. Pendidikan, yaitu memberikan bantuan pendidikan formal atau informal, baik kepada masyarakat, organisasi atau individu, termasuk di dalamnya beasiswa dan pelatihan. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan oleh individu-individu untuk mendapatkan pendidikan khusus mengenai teknologi tepat guna tertentu, atau dimanfaatkan oleh kelompok untuk pelatihan operator teknologi tepat guna tersebut, dan lain-lainnya.
7. Jender, yaitu memastikan adanya kesetaraan antara peran laki-laki dengan perempuan dalam segala aspek. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pelaksanaan suatu program pembangunan di suatu daerah yang mengedepankan keseimbangan jender.

Melihat program dan potensi dana filantropi di atas, maka ada harapan bahwa sebenarnya kekuatan *civil society* dengan gerakan filantropi untuk dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat marginal dan mereka yang kurang beruntung. Partisipasi masyarakat dalam aktifitas filantropi memberikan penegasan bahwa masyarakat kita adalah dermawan, setidaknya *stigma* sebagai bangsa yang dermawan harus menjadi semangat bagi kita untuk meningkatkan partisipasi kita lebih banyak. Berdasarkan riset yang ditulis Elizabeth W. Dunn dkk., Science, volume 319,

tanggal 21 Maret 2008, halaman 1687-1688. Temuan yang menjungkirbalikkan teori ilmu ekonomi itu terbit dengan judul *Spending Money on Others Promotes Happiness* (Membelanjakan Uang untuk Orang Lain Meningkatkan Kebahagiaan). Dunn, ilmuwan di jurusan Psikologi, University of British Columbia, Vancouver, Kanada menemukan kebenaran atas dugaannya itu setelah melakukan serangkaian percobaan. Bersama kelompok penelitiannya, 109 mahasiswa universitasnya dilibatkan dalam penelitian. Mahasiswa yang membelanjakan uang untuk bersedekah atau untuk dibelikan hadiah untuk orang lain ternyata lebih membahagiakan dibandingkan mereka yang menggunakannya untuk keperluan diri sendiri, seperti melunasi rekening atau untuk kesenangan pribadi.

Paradoks Gerakan Filantropi dan Sinergi dengan Program Filantropi

Potensi yang begitu besar dana filantropi masyarakat seringkali tidak sebanding dengan hasil nyata program-program yang dilakukan. Sejatinya apabila kita menggunakan Barry Knight mengatakan bahwa ada lima faktor yang bisa dikategorikan sebagai filantropi untuk keadilan sosial²⁸. *Pertama*, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, misalnya, makanan, pakaian, perumahan, lingkungan hidup, kesehatan, dsb. *Kedua*, berderma untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesetaraan,

seperti kesetaraan gender, anti-diskriminasi, hak asasi manusia. *Ketiga*, kedermwanaan untuk program yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan, misalnya penegakan demokrasi. *Keempat*, dukungan pendanaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. *Kelima*, partisipasi publik di dalam pengambilan keputusan. Kelima program ini bisa dianggap sebagai filantropi untuk keadilan sosial.

Menggunakan pendekatan filantropi progresif untuk keadilan sosial, dengan meninggalkan konsep filantropi yang karitas, sebenarnya menghadapkan pada kita bahwa selama ini pendekatan karitas atau *charity* tidak selamanya mampu meningkatkan kualitas hidup *resipien* dana filantropi akan tetapi justru menjadikan mereka malas untuk mendayagunakan dirinya menjadi lebih baik.

Kasus kegiatan filantropi karitas misalnya, kita sering menjumpai dermawan yang secara sengaja maupun tidak sengaja, membantu pengemis, anak jalanan karena rasa iba. Namun, sikap seperti itu menjadikan pengemis dan anak jalanan semakin nyaman hidup di jalanan dengan terus meminta-minta. Munculnya perda tentang sanksi pemberian uang bagi pengemis dan anak jalanan terkadang berjalan tidak mulus, bahkan sering kali pengemis dan anak jalan “kucing-kucingan” dengan petugas Satpol PP dan Dinas Sosial. Dampaknya adalah tidak cukup

²⁸ Ibrahim, Rustam.2005. “*Filantropi Keadilan Sosial Tidak Identik dengan Advokasi*” dalam Jurnal Galang,

Vol.1 No.1 Oktober 2005, PIRAC, 2005, Opini, Hal 77 – 83.

hanya dengan Perda saja namun perlu kesadaran bersama dengan orang-orang *aghniya'* (orang kaya/punya harta) untuk sadar bahwa masalah seperti kasus di atas menjadikan budaya baru yang tidak produktif bahkan merusak mental penyandang masalah sosial tersebut. Mungkin sosialisasi Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta bisa di contoh dengan membagikan stiker kepada pengguna jalan untuk mengurangi pemberian dana kepada pengemis dan anak jalanan dengan tulisan **“Bukan Tak Mau Memberi, Tapi Tak Ingin Kau Tetap DI JALANAN sebagai Pengemis”**. Media-media seperti ini dapat dilakukan dengan harapan filantropi yang bersifat karitas dilakukan secara terlembaga dan terpercaya.

Luasnya bidang garap dari gerakan filantropi, maka penulis berpandangan sudah saatnya negara dalam hal ini pemerintah mampu menjadi mediator dan katalisator tumbuh kembangnya kegiatan-kegiatan filantropi yang ada saat ini. Namun, demikian bukan berarti pemerintah harus lepas tangan dan tidak aktif, tetapi mau dan mampu untuk menjalankan perannya dalam mensinergikan dengan lembaga, komunitas dan atau kegiatan filantropi yang dilakukan oleh masyarakat.

Urgensi pelaksanaan program dengan indikator sinergi, berlanjut dan tuntas, menjadi mendesak karena hampir semua program yang

dibuat pemerintah seperti Gardu Taskin, IDT, Jaring Pengaman Sosial (JPS), (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) P2KP, dan yang baru dilaksanakan oleh pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PNPM dan P2KP. Walhasil, kemampuan program tersebut tidak berjalan berkelanjutan dan menimbulkan perspektif yang kontra produktif dari berbagai pihak. Maka, tak jarang mega proyek sosial seperti itu menimbulkan efek negatif anggapan rakyat terhadap pemerintah, sehingga banyak dana program sosial menguap tanpa bekas signifikan²⁹. Begitu pula, dengan lembaga-lembaga dan aktifitas filantropi yang dilakukan oleh masyarakat sering kali dan mungkin banyak yang dilakukan *hit and run*, bahkan lebih baik dari program-program pemerintah sehingga terkadang melampaui kebijakan. Bahkan tak jarang dari penggiat agama dengan dalih kepentingan atribut agama, mengajak umat untuk turut serta bersedekah di jalur agama.

Alhasil, jika kita lihat kecenderungan berderma dan berbagi sebagaimana penelitian diawal tadi, masih banyak lembaga-lembaga agama yang menumpuk uang hasil sedekah umat di bank-bank dan hanya untuk memoles dan merawat tempat ibadah. Padahal eksistensi bergama adalah salah satunya membangun

²⁹ Abidin, Zaenal.2012. Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan

Masyarakat (suatu studi pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Malang).Tesis

kualitas dan integritas komunitas seagama dan seimannya, dengan menumbuhkan solidaritas, kohesi dan koherensi sosial secara menyeluruh. Akhirnya, bagi akademisi selayaknya mampu menjadi bagian masyarakat yang tetap kritis dengan berkembangnya gerakan filantropi serta mendorong tumbuhnya nilai-nilai filantropi.

Disisi lain ketika memperbincangkan, program CSR memang menjadi trend dalam dekade terakhir ini bahkan tak jarang program CSR telah menjadi bagian yang integral dalam percepatan pembangunan di daerah-daerah. Perkembangan varian program CSR membuat kajian-kajian teoritis dan paktis menjadi lebih dinamis, bahkan tidak sedikit dari kajian praktis praktik CSR berkontribusi terhadap perkembangan filosofis CSR. Di sisi lain pendekatan teoritis CSR telah membawa wajah baru bagi perusahaan sebagai entitas sosial yang lebih humanis, hal ini tentunya mereduksi citra perusahaan yang sejak era Karl Marx identik dengan sifat kapitalistik dan antagonis yang merepresi buruh. Meskipun pernyataan ini tidak selamanya benar, namun secara umum perusahaan telah menempatkan program CSR sebagai kewajiban moral dan etika perusahaan yang sangat strategis demi menjaga eksistensi perusahaan.

Integrasi program CSR untuk *suistanable development* memang jarang sekali ada pembahasan secara konkrit, terlebih ketika konsep integrasi program tersebut mengalami pasang-surut seiring dengan

dinamisasi strategi investasi sosial setiap perusahaan. Namun daripada itu, keinginan kuat dari para pemerhati program pemberdayaan tak lain adalah adanya kesinambungan program CSR dari 1 perusahaan dengan perusahaan lain dalam wilayah pelaksanaan program yang sama. Artinya program CSR tidak tumpang tindih atau bahkan sifatnya amal karitatif. Banyak sekali program CSR yang dilaksanakan namun belum cukup untuk mendongkrak indikator keberhasilan dari program tersebut terhadap masyarakat. Jauh daripada itu, program CSR masih belum bisa menjadi miniatur kepedulian sosial korporat terhadap isu-isu stretegis bidang kesejahteraan sosial.

Program CSR bukan sekedar kegiatan amal karitatis yang kemudian di kejawantahkan dalam kegiatan-kegiatan sesaat saja maka keberlanjutan program menjadi pilihan yang sangat strategis. Jauh dari pada itu program CSR menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pembangunan di setiap daerah maupun lingkup nasional. Sehingga mau tidak mau program CSR dituntut untuk sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi *master plan* negara Indonesia.

Jalal (2011) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh WCED sebagai '*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*' atau pembangunan yang dapat

memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya³⁰.

Ismail Serageldin dari Bank Dunia sebagai *'a process whereby future generations receive as much capital per capita, or more than, the current generation has available'* atau sebuah proses untuk memastikan bahwa generasi mendatang memperoleh jumlah kapital per kapita minimum setara, atau bahkan lebih besar, dibandingkan dengan yang tersedia untuk generasi sekarang³¹. Yang dimaksud dengan kapital dalam pembangunan berkelanjutan ini, menurut pakar pengembangan masyarakat Jim Ife sebagai pakar pemberdayaan masyarakat atau *community development* menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup kapital natural, ekonomi, sosial, budaya, politik dan personal.

Mengapa peran perusahaan sangat urgen sekali dalam konteks pembangunan berkelanjutan karena Hernan menyatakan fakta bahwa *Sebagian besar bencana lingkungan paling buruk disebabkan oleh perusahaan!*, Kemudian **Kiernan** menunjukkan angka *75% masalah sosial dan lingkungan disebabkan oleh perusahaan.*³² Dari data tersebut jelas, bahwa apa yang

diharapkan dari *triple bottom line report* menjadi kewajiban perusahaan dalam menjadi keberlanjutan pembangunan dan kehidupan sekarang dan yang akan datang.

SINJUTAS (Sinergi-Keberlanjutan-Tuntas) PROGRAM FILANTROPI

Sehingga, dalam kondisi saat ini meletakkan program filantropi dalam pemahaman utuh menjadi penting karena pengentasan masalah-masalah kesejahteraan niscaya dilakukan dengan pendekatan sinergi, keberlanjutan dan ketuntasan. Meskipun serasa ideal, tapi upaya ini perlu diupayakan sehingga wajah permasalahan sosial semakin tahun mengalami penurunan. Bagi pemerintah, portofolio penyelesaian masalah kesejahteraan sosial adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan selain kestabilan politik dan ekonomi. Maka, sudah saatnya, menjalankan agenda perubahan sosial di masyarakat dilakukan dengan **SINJUTAS**. Langkah Sinergis adalah sinergi secara harfiah dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengkonsentrasikan potensi kekuatan untuk satu kepentingan atau satu tujuan bersama, menghindari tumpang tindih program yang dijalankan oleh pemerintah yang sangat mungkin untuk dijalankan secara bersama-

³⁰ Jalal. *Peran Pemangku Kepentingan dalam CSR untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*. di Dumai, Provinsi Riau, tanggal 7 Maret 2011.
www.csrindonesia.com

³¹ Jalal. *CSR untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan Kemitraan Tiga Sektor, Bukan Sekadar*

Pengumpulan "Dana CSR" Diskusi dengan Forum CSR Kota Dumai Dumai, 7 Maret 2011.

www.csrindonesia.com

³² Ibid

sama dengan lembaga atau aktifitas filantropi masyarakat dan perusahaan, maka pantang untuk dijalankan secara sendiri-sendiri. Beberapa langkah sinergi antara lain adalah:

- 1) **Sinergi Kepentingan Strategis Masyarakat**, yaitu sinergi dalam rangka membiayai dan menyelenggarakan sebuah unit aktivitas sosial masyarakat yang dianggap strategis pada periode waktu tertentu, seperti, beasiswa, sekolah, rumah sakit, perpustakaan, reboisasi lingkungan dan sebagainya.
- 2) **Sinergi Bidang Program**, yaitu sinergi untuk melaksanakan satu bidang program yang sama seperti bidang pendidikan atau kesehatan. Pada jenis sinergi ini, pemerintah, masyarakat sipil dan perusahaan yang telah memiliki unit CSR tersendiri atau mungkin koordinator program CSR yang memiliki keinginan terlibat pada satu bidang yang sama, diharapkan untuk berhimpun dan menunjuk koordinator untuk bidangnya dalam rangka melaksanakan program.
- 3) **Sinergi geografis**, yaitu sinergi untuk melaksanakan sebuah program pendayagunaan dana filantropi di suatu wilayah atau daerah. Pemerintah dengan RPJM dan RPJP nya, masyarakat dengan keswadayaannya dan perusahaan-perusahaan dengan program CSR yang ada di satu wilayah bersama-sama melakukan sinergi dalam rangka mendayagunakan dana filantropi dan

mengatasi masalah kesejahteraan sosial di wilayah mereka beraktivitas.

- 4) **Sinergi regional dan internasional**, yaitu para pemerhati dan praktisi program filantropi di Indonesia harus secara bersama-sama mengupayakan terwujudnya sinergi program filantropi di tingkat regional dan internasional. Hal ini sebagai bagian untuk mempersempit *social distance* jumlah warga miskin antar negara sehingga ada subsidi silang atau “ekspor dana Filantropi”.
- 5) **Sinergi Informasi**, yaitu sinergi pada tingkatan mengumpulkan dan menghimpun informasi atau data untuk kemudian diolah dan dimanfaatkan secara bersama dalam rangka pelaksanaan program atau pelayanan kepada semua pihak. Sinergi ini sangat penting dalam pelaksanaan program filantropi di Indonesia yang relatif marak beberapa tahun terakhir ini, agar fokus dan capaian dari apa yang disebut Filantropi modern atau keadilan sosial terpenuhi secara filosofis, manajerial, kemanfaatan baik bagi pemerintah, perusahaan maupun masyarakat sekitar.

Berlanjut, setiap program yang sama antara pemerintah dan lembaga-lembaga filantropi harus dilanjutkan sampai sejauh mana efektifitas dan target atau capaian apa yang telah dilakukan. Kemudian, setiap program yang dilakukan tersebut harus dapat mencapai tingkat ketuntasan, artinya tidak ada

program yang telah dijalankan, disinergikan, berakhir dengan tidak ada hasil menggembarakan secara tuntas, dan penerima bantuan atau program tidak lagi menjadi penyandang masalah sosial kembali.

Sehingga, penulis melihat kemampuan akademisi dan profesi pekerjaan sosial memiliki peran penting, ketika melihat ruh dasar praktik pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial adalah karitas, filantropis menjadi kekuatan yang menuju pada empowering secara menyeluruh dengan melibatkan sistem-sistem sumber yang ada. Dalam kasus ini adalah mengupayakan agar semua aktifitas program filantropi tidak gencar dalam kegiatan karitas, namun lebih pada upaya sinergitas, keberlanjutan dan ketuntasan dengan mengoptimalkan program pemerintah, perusahaan dan masyarakat (lembaga keagamaan, NGO, LSM). Fokus kajian makro dalam keilmuan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah potensi dana filantropi, merupakan segmen menarik untuk dicermati, mengingat trend lembaga, kebijakan dan implementasi program terkesan promotif dan mengkerdikan makna *empowering* yang sinergi,berlanjut, dan tuntas dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial.

Daftar Bacaan :

Abidin, Zaenal dkk. Penguatan Lembaga Zakat dan Masjid sebagai Pemberdayaan *Civil Society* dalam

Demokrasi, Civil Society & Globalisasi.

- Abidin, Zaenal.2012. Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat (suatu studi pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Malang).Tesis.
- Agnes Sumartiningsih, 2004 *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Local*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Machfudh.2010. Mengakses Dana Hibah dan Pembiayaan Lain Dari Lembaga Donor Potensial Di Indonesia
- Heychael, Muhamad dan Roy Thaniago.2013. Ketika Televisi Peduli: Potret Dilematis Filantropi Media (Laporan Penelitian Remotivi atas Praktik Penggalangan Dana Publik di 10 Stasiun Televisi). Remotivi dan Yayasan TIFA). lisensi Creative Common Attribution 3.0.
- Ibrahim, Rustam.2005. "*Filantropi Keadilan Sosial Tidak Identik dengan Advokasi*" dalam Jurnal Galang, Vol.1 No.1 Oktober 2005, PIRAC, 2005, Opini, Hal 77 – 83.
- Isbandi Rukminto Adi.2003.*Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*.Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia:Jakarta.
- Setiana, Lucie.2005.*Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*.Ghalia Indonesia:Bogor.
- Azra,Azyumardi.2012.Filantropi.untuk.Kohesi.Sosial<http://nasional.kompas.com/read/2012/08/18/1654224/>.
- Eka Putra, Maifil.2014.Sumbangan Perusahaan Mencapai 8,6 Triliun.news.pirac.org.19 Juni 2014.
- Maarif, Ahmad Syafii.2014.Masjid dan Kampanye Politik.Tuesday, 04 February 2014, 06:00 WIB.republika.online.

SHARE: SOCIAL WORK JURNAL	VOLUME: 6	NOMOR: 2	HALAMAN: 154 - 272	ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e)
---------------------------	-----------	----------	--------------------	--

Halim, Abdul.2012.www.nahimunkar.com/sikap-tegas-jusuf-kalla-soal-gereja-di-depan-700-pendeta. Kamis, 23 Februari 2012.

Nur.2013.Inilah Fakta Pertumbuhan Rumah Ibadah di Indonesia.Rubrik politik.
<http://wartaekonomi.co.id/berita10828/inilah-fakta-pertumbuhan-rumah-ibadah-di-indonesia.html>.22 Mei 2013.

Jalal. *Peran Pemangku Kepentingan dalam CSR untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*.di Dumai, Provinsi

Riau, tanggal 7 Maret 2011.

www.csrindonesia.com

Jalal. CSR untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan *Kemitraan Tiga Sektor, Bukan Sekadar Pengumpulan "Dana CSR"* Diskusi dengan Forum CSR Kota Dumai Dumai, 7 Maret 2011. www.csrindonesia.com